

## Internet Masuk Desa, Rekam Jejak Pendirian Telecenter di Indonesia

**Widjajanti M Santoso**

*Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI  
widjasantoso@gmail.com*

### Abstrak

*Pendirian telecenter di beberapa tempat di Indonesia diawali oleh pilot proyek UNDP-Bappenas. Pendirian telecenter tersebut menasar desa yang dikategorikan sebagai miskin. Telecenter tidak hanya mendirikan fasilitas computer di perdesaan tetapi juga mengembangkan pemberdayaan berbasis pengetahuan. Penelitian ini bertujuan melihat proses yang terjadi di lapangan terutama bagaimana masyarakat dan individu memanfaatkan fasilitas tersebut. Kebutuhan akan internet masuk desa dilegitimasi oleh pendekatan masyarakat jaringan yang melihat bahwa mereka yang miskin adalah mereka yang tidak memiliki hubungan dengan jaringan. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melihat beberapa telecenter. Hasilnya adalah masyarakat butuh telecenter tetapi perhatian terhadap hal ini sangat terbatas. Ada beberapa kasus dimana masyarakat mencoba membangun dirinya dengan menggunakan telecenter.*

**Kata Kunci:** telecenter, sosiologi, masyarakat jaringan, kemiskinan

### 1. Pendahuluan

Apakah telecenter<sup>1</sup>[1] itu, samakah dia dengan warnet, mengapa penting dipermasalahkan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan standart di dalam pemahaman awal tentang telecenter. Sebelum masuk ke masalah yang lebih dalam perlu diketahui bahwa telecenter berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat di dalam pemahaman umum. Pemberdayaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dari penduduk dan memiliki ciri non-profit. Dalam sisi ini telecenter jelas berbeda dari warnet yang memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis komunikasi. Dalam bentuknya telecenter serupa dengan warnet, ada tempat dengan beberapa komputer, dapat melakukan fungsi seperti print, download dsb, ada petugas yang menunggu dan membantu jika ada pertanyaan dari mereka yang menggunakannya.

Selain ciri pemberdayaan, telecenter memiliki infomobilisator. Infomobilisator adalah orang yang menjadi medium antara informasi yang diperoleh dari komputer dan internet dengan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait. Jika warnet hanya menjadi tempat di mana masyarakat bisa membayar akses komunikasi, maka telecenter adalah tempat masyarakat bertanya tentang masalah dan kebutuhannya yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang dapat dipergunakannya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Tugas dan fungsi yang sama sekali tidak mudah dan memiliki ciri philantropis. Ciri philantropis ini memperlihatkan bahwa orang yang menjadi perantara tersebut memiliki hati besar dan ingin 'share' pengetahuan untuk kepentingan orang lain. Padahal mungkin jika pengetahuan itu disimpan sendiri dengan harapan hanya dialah yang merasa kaya, atau hanya dia yang dapat menggunakan pengetahuan itu untuk kebutuhan kehidupannya.

Apakah ini paradoks? Mungkin ya, dalam sisi komputer dan internet adalah kapital untuk mendatangkan kehidupan. Berkembangnya komputer dan internet saat ini salah satunya adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, karena alat tersebut memberikan akses yang besar terhadap kemungkinan yang dapat kita raih. Model keberhasilan 'keong racun' adalah salah satu contoh dari keberhasilan tersebut. Padahal di dalam sisi lain ada pemberdayaan yang berarti bahwa komputer dan internet digunakan secara

---

<sup>1</sup> Penelitian ini didanai oleh program CSSI – Critical and Strategic Social Issues di LIPI. Peneliti terdiri dari Widjajanti M Santoso (ketua), Nina Widyawati, Katubi, Rochmawati dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI dan Djoko Waluyo dari Kominform.

sosial untuk mengangkat sisi kemasyarakatan. Oleh karena itu pendirian telecenter erat kaitannya dengan ciri masyarakat tertentu, dalam hal ini dalam konteks kemiskinan, dan masyarakat di mana akses komunikasi dan alat seperti komputer dan internet sulit diperoleh.

Oleh karena itu tidak aneh bahwa pendirian telecenter biasanya berkaitan dengan intervensi pemerintah atau lembaga yang berwenang. Selain itu kegiatan seperti ini juga berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan dunia global, dalam hal ini berkaitan dengan negara-negara anggota PBB. WSIS atau *World Summit on the Information Society* merupakan pertemuan Negara anggota PBB untuk membahas mengenai masyarakat informasi di mana salah satu butirnya adalah kesadaran tentang kemiskinan dan bagaimana informasi bisa dipergunakan untuk mengatasinya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesempatan untuk mengembangkan akses internet untuk orang miskin.

Perlu disadari bahwa kemiskinan memiliki banyak definisi, dan yang mencakup tema ini adalah kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif berhadapan dengan masalah yang lebih rumit dibandingkan dengan kemiskinan absolut yang secara jelas mensasar ketidatersediaan pangan misalnya. Kemiskinan relatif juga kurang populer dibandingkan dengan kemiskinan absolut yang saat ini menjadi komoditas politik baik dari penguasa maupun oposisinya. Bahkan seringkali kemiskinan relatif dianggap tidak penting dan dianggap bukan masalah, karena barangkali berhadapan dengan orang yang memiliki potensi, namun tidak punya akses. Sehingga tidak dinyana bahwa kemiskinan relatif dianggap bukan kemiskinan.

Dalam konteks komunikasi, kemiskinan yang berhubungan dengan TIK secara umum digambarkan melalui konsep kesenjangan digital. Perlu ditekankan bahwa Indonesia sudah memiliki kesadaran wacana tentang hal ini seperti yang tertera dibawah ini:

”adanya ketidaksamaan terhadap kemampuan akses ke jaringan infrastruktur ICT yang di dalamnya mengalir beraneka ragam informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan keahlian SDM sebuah negara dalam konteks pembentukan masyarakat moderen berbasis informasi dan/atau pengetahuan” [2].

Pada tingkat global sudah terdapat kesadaran tentang pentingnya TIK, yang terlihat dari mu

Manuel Castells tentang globalisasi, yang menunjuk pada “... makin menduniannya rantai politik, ekonomi, dan sosial serta makin menonjolnya interaksi dan keterhubungan di dalam dan antara negara dan masyarakat.” [3] Hubungan antara perkembangan TIK dan kemiskinan di dalam pemahaman masyarakat jaringan diperantarai oleh konsep yang disebut dunia keempat.

Tabel di bawah ini memperlihatkan posisi Negara yang memiliki masalah di dalam ketersediaan TIK dengan tingkat kemiskinan. Sebaliknya negara yang kurang memiliki masalah dalam kesenjangan digital merupakan negara yang tidak terkategori sebagai negara miskin.

Tabel 1: Kemiskinan dan Posisi TIK – Penetrasi Internet

<i>Negara</i>	<i>Penetrasi internet</i>	<i>Literasi orang dewasa</i>	<i>Literasi perempuan dewasa</i>	<i>Pembaca koran % dari seluruh populasi</i>	<i>Tingkat kemiskinan</i>
Singapura	<b>29.9</b>	92.1	88.0	32.4	-
Malaysia	<b>15.9</b>	87.0	82.8	16.3	<b>13</b>
Thailand	<b>3.8</b>	95.3	93.5	6.4	<b>21</b>
Philippines	<b>2.6</b>	95.1	94.9	8.2	<b>23</b>

<i>Negara</i>	<i>Penetrasi internet</i>	<i>Literasi orang dewasa</i>	<i>Literasi perempuan dewasa</i>	<i>Pembaca koran % dari seluruh populasi</i>	<i>Tingkat kemiskinan</i>
Indonesia	<b>0.9</b>	86.3	81.3	2.3	<b>38</b>
Vietnam	<b>0.25</b>	93.1	91.0	0.4	<b>45</b>
Lao PDR	<b>0.1</b>	47.3	31.7	0.4	<b>66</b>
Cambodia	<b>0.05</b>	68.2	57.7	0.2	<b>78</b>

Sumber: ITU 2002 dan UNDP 2001<sup>2</sup>

Makalah ini ingin menunjukkan bahwa konsep kemiskinan sendiri perlu diperhatikan dengan seksama mengingat kondisi yang dimiliki oleh setiap negara, komunitas, masyarakat saling berbeda. Dalam hal ini Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan kondisi rawan pangan. Tantangan itu antara lain perlu dilihat dari konteks geografis dan populasi disamping juga masalah seperti kebutuhan untuk bersaing dengan orang atau negara lain.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini melakukan rekam jejak terhadap pengembangan telecenter yang pernah dilakukan oleh UNDP-Bappenas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berdasar pada pertimbangan bahwa proses penerapan dan keberlangsungan sebuah program merupakan informasi yang penting. Melalui proses rekam jejak seperti ini dapat diketahui apa yang dihadapi dan merupakan tantangan dari sebuah program. Dengan cara seperti ini sebuah program dapat dilihat dengan lebih rinci dengan memasukkan unsur masyarakat yang seringkali hilang di dalam proses evaluasi sebuah program.

Untuk mempermudah melihat kondisi lapangan tentang telecenter dan bagaimana masyarakat menggunakannya, penelitian ini mengadopsi 12 indikator untuk memahami proses penerapan program ICT4P. Indikator tersebut diperoleh dari UNCTAD berdasar kajian yang dilakukan oleh Rao (2003).<sup>3</sup> Indikator tersebut adalah konektifitas, komunitas, isi/materi, komerse, kapasitas, kebudayaan, kerja sama, modal, konteks, kontinuitas, kontrol, dan koherensi. Indikator ini kemudian dibuat daftar pertanyaan yang ditanyakan berdasar kepentingan pada pengelola telecenter, masyarakat yang sudah menggunakannya, dan juga informasi dari birokrasi pemerintah daerah terutama Propinsi. Informasi yang diperoleh memang dirancang mulai dari informasi pada tingkat nasional, pemerintah daerah hingga ke telecenter, yang disesuaikan dengan konteks global, nasional dan lokal. Konteks global, nasional dan lokal merupakan implikasi dari pendekatan yang melihat TIK dan dalam kasus ini adalah telecenter merupakan rangkaian kebijakan yang perlu memasukkan elemen globalisasi di dalamnya.

Telecenter dikembangkan UNDP-Bappenas dengan mensasar masalah kemiskinan. Program mereka disebut sebagai PePP, *Partnership for e-Prosperity for the Poor*. Bahkan di dalam pencarian tentang daerah, mereka secara langsung mencari desa yang terkategori desa miskin. Tidak seluruhnya pandangan ini dilakukan, karena berdasarkan kenyataan di lapangan, desa tersebut minimal memiliki listrik. Sedangkan koneksi bahkan mereka mencoba dengan menggunakan satelit, sebelum koneksi komunikasi tersambung. Telecenter dibangun juga dengan

<sup>2</sup> *Ibid.* Hlm. 83.

<sup>3</sup> *Ibid* UNCTAD, hal 185.

memperhatikan tempat, sebuah ruang atau bangunan yang memiliki ruang komputer, administrasi dan ruang multi media.

### 3. Temuan Lapangan

Di dalam mencari informasi tentang telecenter pada pemerintah daerah, terlihat reaksi yang berbeda-beda. Reaksi yang paling bagus adalah daeri Propinsi Jatim yang mampu menceritakan alur berkembangnya program telecenter. Bahkan Propinsi Jatim membuat inisiatif untuk mengadosi pola telecenter ini untuk dikembangkan di daerah pada tingkat Kabupaten. Sehingga tidak aneh di Jatim dapat ditemukan Astel atau Asosiasi Telecenter yang dibentuk dari telecenter yang dikembangkan di Jawa Timur. Propinsi ini sebenarnya hanya mendapatkan satu bantuan saja, namun mereka berinisiatif untuk membangun dua telecenter dengan cara cost sharing. Pemerintah daerah turut mendukung pendanaan, dan telecenter yang mereka dukung kemudian mengikuti pelatihan yang dibuat oleh UNDP-Bappenas. Propinsi ini perlu mendapatkan apresiasi karena berani mencoba, ketika rata-rata orang berpendapat bahwa komputer dan internet untuk orang miskin dianggap sebagai progam yang mengada-ada. Propinsi Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan yang sama, namun memiliki reaksi yang berbeda. Di propinsi ini, telecenter yang pertama dibangun sebagai pilot projek yang langsung mensasar pada masyarakat kurang melibatkan elemen birokrasi. Proses kesejarahan ini ternyata menjadikan telecenter di propinsi ini dianggap asing. Sehingga kemudian pemerintah daerah tidak merasa memiliki telecenter.

Di dalam skemanya perkembangan telecenter sebenarnya terkait dengan kebijakan dari tingkat global yang muncul sebagai sebuah kesepakatan, tingkat nasional dengan membuat skema telecenter hingga penerapannya pada tingkat lokal. Namun yang terjadi adalah kebijakan ini seperti tidak memiliki jalur pada tingkat pemerintah daerah. Salah satu yang menjadi alasan yang sering dikemukakan adalah masalah perubahan otonomi daerah. Otonomi daerah membuat perubahan pada struktur organisasi, sehingga di daerah seringkali proses ini belum selesai dan berhadapan dengan masalah sumber daya manusia yang kurang sesuai antara ketrampilan yang dimilikinya dengan kebutuhan kerja yang ada. Kalaupun ada pemikiran yang ideal cenderung terdapat pada beberapa oran saja, sehingga memerlihatkan masalah koordinasi. Kementerian pada tingkat nasional tidak dapat melakukan intervensi program seperti yang pernah terjadi pada rejim yang lalu. Posisi komunikasi seringkali diletakkan pada dinas perhubungan, sehingga masalah yang berhadapan dengan komunikasi cenderung berkisar pada masalah pendataan dan yang besar saja seperti data tentang warnet atau frekwensi radio. Dalam konteks kebutuhan masyarakat apalagi tentang TIK dan kemiskinan belum lagi terpikirkan.

Namun disisi lain, bentukkan yang sama dengan telecenter dan lebih sederhana ternyata sudah dibangun atau diupayakan oleh masyarakat sipil. Sehingga ditemukan sebuah desa yang menyiapkan seperangkat komputer dan internet yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Sehingga di dalam hal ini bentukkan ideal seperti telecenter sebenarnya dapat dilakukan dengan lebih sederhana. Desa yang mengembangkan pelayanan seperti ini menyadari bahwa internet sekarang ini merupakan media yang penting untuk mendapatkan informasi. Terutama kepentingan yang mereka antisipasi adalah informasi tentang pekerjaan seperti pekerjaan sebagai pegawai negeri yang saat ini diinformasikan melalui internet. Selain itu desa tersebut juga menyadari bahwa komputer saat ini adalah bagian dari pelajaran di sekolah sehingga posisi komputer dan internet menjadi sangat penting.

Temuan lapangan menunjukkan adanya sejumlah masalah yang dihadapi telecenter. *Pertama*, telecenter diharapkan memiliki dua fungsi sekaligus, yakni fungsi pemberdayaan sebagai fungsi sosial dan fungsi kemandirian. Sebagai lembaga yang berfungsi sosial, telecenter harus

mengutamakan tujuan sosial, misalnya membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat dengan menyediakan akses informasi dan turut mengembangkan UKM yang ada di lingkungan telecenter. Selain itu, biaya layanan yang dikenakan kepada masyarakat juga tidak boleh sama dengan biaya lembaga swasta yang berusaha memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pada sisi lain, telecenter dituntut mandiri dalam operasionalnya karena sekarang tidak ada lagi dana operasional yang dikucurkan kepada telecenter, baik oleh Bappenas, Pemprov, pemkab, kecamatan, maupun desa. Oleh sebab itu, seluruh biaya operasional sekarang berdasar pendapatan telecenter. Padahal, seharusnya jika ada tuntutan telecenter yang benar-benar mandiri, diperlukan kerja penuh waktu oleh pengelola karena kemandirian telecenter terletak pada tangan pengelolanya. Oleh sebab itu, sebenarnya telecenter memerlukan orang-orang yang siap bekerja seratus persen untuk telecenter. Persoalannya ialah: adakah orang yang mau dituntut bekerja dengan mencurahkan perhatian penuh, tetapi mendapatkan honor sekitar Rp150.000 per orang per bulan?

*Kedua*, kurang adanya kerja sama dengan berbagai lembaga yang seharusnya menangani masalah itu sendiri menjadikan telecenter tempat bertumpunya segala pemecahan masalah. Misalnya, departemen perindustrian atau perdagangan sebenarnya harus turun tangan mengatasi permasalahan UKM di desa-desa dan membantu mengembangkan potensi yang ada di desa. Akan tetapi, selama ini tidak ada sama sekali sehingga telecenter harus berjuang sendiri mencari sponsor mengadakan berbagai kegiatan yang ada hubungannya dengan industri kecil. Jika disekitar telecenter adalah masyarakat petani, seharusnya Departemen Pertanian dapat membantu telecenter untuk melakukan fungsinya di lingkungan masyarakat petani.

*Ketiga*, sebagian masyarakat menyadari potensi yang ada di desanya sendiri. Akan tetapi, mereka tidak memiliki alat pengolahan berbagai potensi itu dan mereka berharap banyak kepada telecenter untuk membantu memecahkannya. Padahal, telecenter hanya bisa membantu dengan memberikan akses terhadap informasi untuk memecahkan masalah itu. Sementara itu, aspek praktisnya tidak bisa dipecahkan oleh telecenter sendiri.

*Keempat*, kurangnya pengetahuan/pemahaman manajemen pemasaran berbasis internet, baik oleh pengelola telecenter maupun masyarakat sehingga pemasaran produk masyarakat sekitar kurang maksimal. Seandainya sudah mendapatkan permintaan dari pelanggan, permintaan itu kontinuitasnya kurang. Ada kalanya hal itu disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat dalam menjaga mutu produk.

*Kelima*, adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dengan pengurus tentang telecenter. Masyarakat menganggap bahwa telecenter adalah segalanya: tempat mendapatkan pembinaan, tempat mendapatkan bantuan *financial*, tempat mendapatkan pemasaran, dan sebagainya. Bahkan, masyarakat menganggap telecenter sebagai *showroom* produk mereka. Padahal, telecenter tidak memiliki kapasitas sebanyak itu.

#### **4. Kesimpulan**

Program telecenter UNDP-Bappenas sudah berakhir, beberapa dari telecenter saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan kegiatannya. Namun program seperti ini menelurkan beberapa hal penting. Salah satunya adalah program ini yang sadar bahwa dirinya perlu melakukan sosialisasi sudah menghasilkan beberapa modul dan pembelajaran tentang telecenter dan fungsinya. Modul dan pembelajaran ini merupakan data dan informasi yang berharga jika masyarakat ingin mengembangkannya. Kedua program ini memperlihatkan bahwa kerjasama dengan pemerintah daerah sangat penting di dalam mengembangkan intervensi yang cenderung dianggap aneh. Perlu disadari bahwa anggapan bahwa program seperti ini aneh adalah sebuah

pendapat yang bias kelas dan bias perkotaan. Seakan akan ada asumsi bahwa mereka yang mampu menggunakan komputer dan internet adalah mereka yang sudah berpendidikan, dari kelas menengah-atas yang mampu mengakses komputer dan internet dan hanya ada di daerah perkotaan karena masalah koneksi komunikasi.

Pendapat seperti itu harus dilihat sebagai pendapat yang salah, karena pembangunan adalah hak semua orang. Dalam hal ini posisi pemerintah daerah menjadi penting karena mereka yang kemudian perlu menyadari bahwa menyediakan akses komputer dan internet adalah salah satu dari tugas mereka. Mereka juga perlu menyadari bahwa kegiatan seperti ini membutuhkan dukungan dana karena ada biaya dasar seperti listrik dan koneksi internet yang perlu dipikirkan. Beberapa telecenter dapat mengusahakan tarif diskon, itupun dengan informasi yang diperoleh secara pribadi karena kedekatan individual dan kesamaan ide. Dalam hal ini masih banyak hal yang dibutuhkan oleh telecenter untuk berkembang yang perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pemerintah. Telecenter yang dikembangkan oleh UNDP-Bappenas hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita semua.

Program ini juga menunjukkan bahwa dengan adanya telecenter ini beberapa warga di daerah perdesaan kemudian urung menjadi pengangguran. Dengan telecenter, para pengelola mengembangkan pendidikan dan pelatihan menggunakan komputer dan kemudian juga menggunakan fasilitas telecenter untuk program kejar paket A. Sebetulnya kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang mengentaskan kemiskinan. Seorang anak di daerah perdesaan tidak melanjutkan sekolah karena alasan transportasi dan ketersediaan fasilitas, disamping mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya. Dengan adanya telecenter mereka dapat mendapatkan ketrampilan tanpa harus setiap hari pergi ke kota untuk mendapatkan fasilitas ini.

Ternyata di dalam penggunaannya, mereka yang memiliki pendidikan yang terbatas ternyata dapat dididik menjadi operator telecenter yang handal. Mereka mampu mengatasi masalah yang timbul ketika seseorang berusaha menggunakan komputer dan internet. Beberapa program yang ingin disosialisasikan di daerah tersebut menggunakan fasilitas telecenter seperti laptop dan LCD untuk mempermudah presentasi.

Program seperti ini perlu dukungan ketrampilan untuk mengembangkan e-business. Beberapa dari pengusaha kecil telah berusaha untuk mengembangkan bisnis mereka dengan menggunakan internet sebagai media pemasaran. Akan tetapi perkembangan bisnis ini sangat cepat dan mereka yang bergerak di UKM sebenarnya membutuhkan mediasi untuk mengantarkan bisnis mereka dapat diterima di bisnis online. Beberapa petani sudah dapat menggunakan informasi untuk pengembangan pertanian atau peternakannya. Hal ini memperlihatkan bahwa penggunaan informasi dengan benar dapat diterapkan di dalam pertanian dan dapat dipergunakan untuk meningkatkan produktifitas. Yang perlu diketahui adalah masyarakat merasa membutuhkan sekaligus merasa putus asa di dalam upaya intervensi program yang ada. Pengalaman mereka melakukan program memperlihatkan bahwa seringkali mereka ditinggalkan tanpa ada kata-kata yang menunjukkan bahwa program tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Pengelola telecenter harus berhadapan dengan sikap skeptis seperti ini. Selain itu jenis pertanian tampaknya mempengaruhi seberapa jauh seorang petani mau mencoba dan berubah. Petani padi pada umumnya lebih konservatif dan kurang mau mencoba hal yang baru. Pertanian mereka mengandalkan keteguhan dan kesinambungan. Oleh karena itu pengalaman melakukan intervensi pada petani padi perlu membuat kebun percobaan yang tidak mempengaruhi pertaniannya, karena mereka mengambil resiko yang lebih sedikit untuk gagal.

Selain itu masalah koordinasi merupakan masalah yang sangat penting untuk dikerjakan. Masalah ini di lapangan muncul di dalam sikap bahwa sebuah program adalah pekerjaan dinas tertentu dan

bukan merupakan tanggung jawab sebuah dinas. Akan tetapi di dalam intervensi di dalam masyarakat yang dibutuhkan adalah sebuah sinergi di mana beberapa dinas bekerja sama untuk mendukung potensi yang ada di daerah perdesaan untuk maju dan berkembang. Dengan adanya otonomi daerah sebenarnya pekerjaan seperti ini sangat dimungkinkan karena mereka perlu mengembangkan potensi yang ada. Akan tetapi hal ini mengingatkan kita pada kebutuhan untuk mengubah *mind set* seseorang. Perubahan *mind set* ini tidak hanya di dalam upaya untuk bekerja sama, akan tetapi juga mencari terobosan baru. Telecenter sendiri sebenarnya adalah sebuah terobosan baru, tetapi tanpa perubahan *mind set* yang ada, orang akan melihat kegiatan ini sebagai sebuah hal yang aneh semata. Padahal perkembangan TIK telah mengubah cara berpikir di mana sekarang ini pertanyaan dapat diajukan pada “mbah Google” tanpa harus mencari “mbah” lain yang tidak tentu rimbanya.

### Daftar Pustaka

- [1] Penelitian ini didanai oleh program CSSI – Critical and Strategic Social Issues di LIPI. Peneliti terdiri dari Widjajanti M Santoso (ketua), Nina Widyawati, Katubi, Rochmawati dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan – LIPI dan Djoko Waluyo dari Kominfo.
- [2] Badan Litbang SDM Komunikasi dan informasi – DepKominfo, PT Praweda Ciptakarsa Informatika, 2006, Studi *Blue Print Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika*, Jakarta hal 26
- [3] Adeline M Tumenggung, 2005, *Laba-Laba Media: Hidup dalam Galaksi Informasi*, (Jakarta: LSPP), hlm. 18.
- [4] Digital Divide Report. “ ICT Diffusion Index 2005”. Lihat juga United Nation Conference on Trade and Development. Dalam UNCTAD.org.
- [5] UNCTAD. “The Role of ICT in Poverty Reduction: The One Dimensional Network Society of Manuel Castles”, <http://1.1.1.1/bmi/www.thecronicle.demon.c>, diakses 7-01-09.
- [6] UNCTAD. 2006. “Information Economy Report 2006, The Development Perspective”, UN, UNCTAD, (United Nations Trade and Development).